



KANWIL ATR/BPN
PROVINSI ACEH
MAJU DAN MODERN

Melayani, Profesional, Terpercaya

Newsletter Rakanbpn

No. 3 Edisi Desember 2020

2 Berita Utama 3 Ajudikasi 4 Pembangunan Infrastruktur Pasca Tsunami
5 Layanan berbasis Digital 6 Rakerda 7 Urban Farming 8 Inovasi

Aceh



Refleksi Tsunami dan Kekuatan Masyarakat Aceh dalam Menghadapi Pandemi Covid-19

“Hikmah Pandemi Covid-19 dalam Layanan Pertanahan”

“Berhasil Bangkit dari Musibah Tsunami, Memperkuat Kita Menghadapi Covid-19 dengan Menciptakan Inovasi-inovasi Layanan Pertanahan secara Elektronik”

Pelindung: Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh, **Penanggung Jawab:** Tina Mestika, S.H.
Redaktur: Hana Faristi, S.H., **Penyunting/Editor:** Meutia Riskiyana Zuhra, S.H., Zaskia Yunita, S.T., Aula Pambudi, S.Sos., Yan Andika, S.P., Milda, S.H., **Desain Grafis:** Husnul Izzati, S.E., **Fotografer:** Humas Kanwil BPN Provinsi Aceh, **Alamat Redaksi:** Jalan T. Nyak Arief, Lamgugob, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Kode Pos 23115, Telp. 0651-7551708, www.nad.atrbpn.go.id



Refleksi Tsunami Aceh dan Kekuatan Masyarakat Aceh dalam Menghadapi Covid-19

“HIKMAH PANDEMI COVID-19 DALAM LAYANAN PERTANAHAN”

Minggu pagi, 26 Desember 2004 Nangroe Aceh diguncang gempa dahsyat berkekuatan 9,1 s.d 9,3 SR yang disusul gelombang raksasa “tsunami” dengan kecepatan 100 meter per detik atau 360 kilometer perjam. Bencana yang menelan korban ratusan ribu jiwa manusia serta kerusakan serius pada infrastruktur, nyaris melemahkan seluruh sendi kehidupan masyarakat Aceh. Kini 16 Tahun pasca terjadinya Tsunami Desember 2004 Aceh telah kembali kepada kehidupan normalnya, tanda dan bekas tsunami itu hampir hilang kecuali yang memang dipertahankan sebagai situs tsunami dan dijadikan obyek wisata religi.

Dari Tsunami kita telah belajar bagaimana cara untuk bangkit lagi, bagaimana kita harus bersatu dan bahu membahu berjuang untuk keluar dari sebuah musibah, saling percaya dan menguatkan menjadi kunci bangkitnya kekuatan masyarakat di tengah musibah.

2020 ujian kembali menerpa bukan hanya masyarakat Aceh namun juga bangsa Indonesia dan seluruh dunia dengan adanya Pandemi Covid 19, namun dibalik sebuah musibah tentunya ada hikmah yang dapat dipetik. Salah satu hikmah dari pandemi covid 19 ini adalah masyarakat lebih melek teknologi, pandemi Covid-19 memaksa seluruh lini kehidupan bertransformasi dengan sangat cepat, semangat ini dapat dipertahankan dan menjadi batu loncatan untuk transformasi berikutnya. Tantangan bagi kita adalah bagaimana kita bisa bangkit untuk melakukan lompatan-lompatan teknologi. Hal ini untuk menjaga dan menjadikan pandemi sebagai peluang untuk memulihkan kondisi ekonomi masyarakat. Covid-19 telah memengaruhi masyarakat hingga level akar rumput namun kemudian teknologi dapat menyelamatkan sebagian ekonomi dengan konversi offline ke online business atau e-commerce. Begitu juga dalam hal pelayanan publik Covid-19 pun tak elak membuat para penyelenggara negara harus beradaptasi dengan cepat untuk mengatasi permasalahan permasalahan yang timbul akibat covid 19 ini.

Dalam hal layanan pertanahan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengeluarkan beberapa stimulus untuk mengurangi dampak ekonomi terkait pandemi Covid-19. Beberapa layanan dengan menggunakan teknologi digital maupun kemudahan lainnya diluncurkan untuk kemudahan masyarakat saat wabah ini berlangsung. Memaksimalkan pelayanan elektronik atau online dimasa pandemi Covid-19 ini dapat mengubah kebiasaan masyarakat dalam memanfaatkan pelayanan pertanahan dari layanan tatap muka menjadi layanan berbasis elektronik. Tatanan New Normal dengan kebiasaan baru yang muncul dikalangan masyarakat karena telah menyesuaikan cara hidup dimasa pandemi yang salah satunya adalah dengan kebiasaan menggunakan teknologi dalam segala lini kehidupan.

Kanwil BPN Provinsi Aceh juga telah melakukan adaptasi dengan cepat, mengoptimalkan layanan elektronik yang telah ada dan juga terus berinovasi untuk mempermudah layanan di masa pandemi ini, sehingga masyarakat merasa lebih aman dan nyaman, demi komitmen untuk tetap bisa memberikan pelayanan prima.

Perubahan-perubahan terus dilakukan oleh Kanwil BPN Provinsi Aceh sejalan dengan road map Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN dimana tahun 2020 adalah layanan elektronik dan 2021 sampai dengan 2022 adalah fully digital. Inilah hikmah besar dibalik pandemi covid-19 yang mempercepat langkah kita, memberikan loncatan besar dalam penggunaan teknologi dalam pelayanan pertanahan, maka benarlah bahwa selalu ada hikmah dibalik sebuah musibah jika manusia mau berpikir dan berusaha.

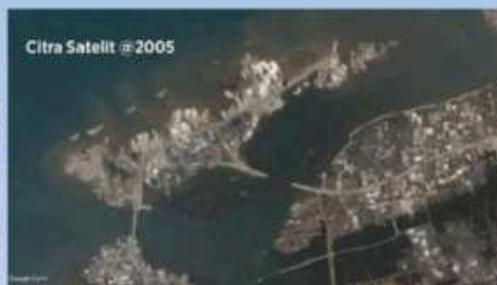


SIPPA
Sistem Informasi Penataan Pertanahan Aceh



GO UKUR.





AJUDIKASI PASCA TSUNAMI ACEH 2004

Bencana gempa bumi dan tsunami yang melanda Aceh pada tanggal 26 Desember 2004 memberikan dampak yang luar biasa bagi kehidupan masyarakat Aceh dalam segala aspek. Selain menghancurkan sarana dan prasarana, tsunami juga mengakibatkan banyak pemilik tanah kehilangan tanahnya akibat hilangnya penanda batas dari puluhan ribu persil tanah. Selain itu, terdapat banyak bidang tanah yang tidak lagi bertuan karena pemiliknya meninggal dunia serta tenggelamnya sejumlah persil akibat pergeseran tanah dan garis pantai.

Sekitar 12.000 lembar Sertipikat Hak Atas Tanah, sebagai dokumen yuridis kepemilikan tanah yang berisikan informasi tentang lokasi persil tanah juga turut hilang. Disamping itu diperkirakan sedikitnya 40.000 lembar Sertipikat yang tersimpan di Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh dapat diselamatkan walau dengan kondisi yang tidak utuh atau rusak.

Sebagai akibat dari dampak bencana gempa dan tsunami tersebut maka perlu dilakukan penataan kembali baik secara administratif maupun secara yuridis terhadap berbagai persoalan yang berkaitan dengan masalah pertanahan di wilayah yang terkena dampak tsunami, terutama yang berkaitan dengan dokumen hukum kepemilikannya, yaitu melalui pendataan ulang atas kepemilikan persil tanah melalui sertifikasi (pensertifikatan) terhadap tanah secara menyeluruh melalui proses adjudikasi. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, adjudikasi adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.

Badan Pertanahan Nasional sebagai lembaga pelaksana pendaftaran tanah dalam wujud pelaksanaan tugas dan wewenangnya membantu Panitia Adjudikasi untuk rekonstruksi wilayah Aceh. Terdapat dua tim pelaksanaan rekonstruksi pertanahan pasca bencana tsunami di Aceh yaitu tim adjudikasi yang bernaung dibawah organisasi RALAS (Reconstruction of Aceh Land Administration System) dan tim adjudikasi yang bekerja di bawah naungan BRR (Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi) wilayah Aceh. Pendanaan untuk kegiatan ini bersumber dari APBN Badan Pertanahan Nasional dan dana hibah dari negara-negara donor melalui Bank Dunia.

Dalam prosesnya, Badan Pertanahan Nasional melakukan desain pertanahan secara hati-hati dengan melibatkan komponen masyarakat untuk memastikan kepemilikan dan pengembalian sebuah bidang tanah. Menurut Joyo Winoto, Kepala Badan Pertanahan Nasional saat itu, batas tanah antara satu dan lain ditentukan bersama dengan masyarakat. Setelah disepakati dan dipasang patok oleh masyarakat, BPN melakukan pengukuran dan membuat sertifikat tanah tersebut.

Proses rekonstruksi batas persil tanah di Aceh yang hancur ataupun hilang akibat gempa dan tsunami 26 Desember 2004 bukan suatu hal yang mudah, mengingat banyaknya permasalahan teknis maupun nonteknis yang melingkupinya. Kendati demikian, BPN hadir untuk menyelenggarakan proses pensertifikatan tanah pasca bencana alam, tidak hanya di Provinsi Aceh tapi juga di daerah-daerah lain di Indonesia yang terkena dampak bencana alam. Proses pensertifikatan terhadap tanah secara menyeluruh di wilayah bencana sangat dibutuhkan dengan segera karena tanah merupakan salah satu aset berharga dan menjadi sumber kehidupan paling penting dalam kehidupan manusia. Selain itu, pensertifikatan tanah pasca bencana juga sangat dibutuhkan untuk menghindari terjadinya konflik pertanahan di kemudian hari. Kegiatan adjudikasi ini menjadi salah satu langkah penting dalam perjalanan panjang Provinsi Aceh menuju provinsi lengkap agar Kebijakan Satu Peta (One Map Policy) dapat terwujud.



¹ Hasanuddin Z. Abidin, et al., "Rekonstruksi Batas Persil Tanah di Aceh Pasca Tsunami: Beberapa Aspek dan Permasalahannya", (Infrastruktur dan Lingkungan Binaan Vol.1, No. 2 Desember 2005), hlm.1.

² <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol14283/ratusan-bendel-buku-tanah-dikembalikan-ke-aceh?page=all>

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PASCA TSUNAMI

CASE STUDY : PENGADAAN TANAH PSN

Pada tanggal 26 Desember 2004 silam, Tsunami telah menghantam Tanah Rencong. Ribuan jiwa menjadi korban, baik korban tewas maupun korban hilang yang belum ditemukan sampai saat ini serta ribuan Kepala Keluarga yang telah kehilangan tempat berteduh akibat bangunan yang hancur dan rusak berat. 16 tahun sudah bencana dahsyat itu melanda. Aceh kini sudah berbenah. Pembangunan Infrastruktur telah tertata dengan baik. Serta masyarakat Aceh yang sudah mulai bangkit dari rasa trauma mereka. Aceh kini kembali mengaum.

Tak ketinggalan dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh yang juga mulai menampakan gigi taringnya pasca tsunami melanda. Berbagai macam progress sudah terlaksana dengan baik demi mewujudkan BPN ACEH JUARA. Bahu-membahu membangun BPN dengan landasan 7 pilar yang menjadi visi dan misi BPN di masa yang akan datang.

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh patut berbangga dengan berhasilnya salah satu Proyek Strategis Nasional di Provinsi Aceh yakni pembangunan Jalan Tol Aceh Ruas Sigli-Banda Aceh yang terbentang sepanjang 75 km dan merupakan Jalan Tol Pertama di Provinsi Aceh. Dengan progress percepatan Jalan Tol Aceh Ruas Sigli-Banda Aceh yang sudah mencapai 90,96 % atau sudah terealisasi sekitar 785,23 Ha dari total luas keseluruhan 863,26 Ha dan ditargetkan selesai di tahun 2021.

Pada tanggal 25 Agustus 2020, Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo telah meresmikan Jalan Tol Aceh khusus di seksi 4 yang merupakan simpang susun dari Blang Bintang menuju Indrapuri dengan luas 166,06 Ha dan dalam peresmian tersebut mendapat apresiasi langsung dari Presiden RI yang menyatakan bahwa pembebasan lahan Jalan Tol di Aceh merupakan pembebasan lahan tercepat dibanding provinsi lain di Indonesia. Presiden juga berharap dengan adanya jalan tol ini bisa mempercepat laju pertumbuhan ekonomi di Aceh serta bisa menyerap banyak lapangan pekerjaan serta Jalan Tol Aceh ini bisa menjadi Episentrum pertumbuhan ekonomi baru di Pulau Sumatera.

Selain Jalan Tol Aceh Ruas Sigli-Banda Aceh, terdapat beberapa PSN yang dilaksanakan di Provinsi Aceh diantaranya Bendungan Keureto yang berlokasi di Kabupaten Aceh Utara dengan luas 1.076 Ha, Bendungan Rukoh yang berlokasi di Kabupaten Pidie dengan luas 858,85 Ha, Jaringan Irigasi Lhok Guci yang berlokasi di Kabupaten Aceh Barat dengan luas 291 Ha dan Jaringan Irigasi Jambo Aye Kanan yang berlokasi di Kabupaten Aceh Timur dengan luas 102 Ha. Serta di Tahun 2020 ini telah dimulainya progress pembangunan Jalan Tol Ruas Binjai-Langsa dengan luas 587,72 Ha.

JALAN TOL ACEH INI TERBAGI DALAM 6 TAHAP Pengerjaan

SEKSI 1

Padang Tiji - Lembah Seulawah
(308,439 Ha)

SEKSI 2

Lembah Seulawah - Kuta Cot Glie
(99,759 Ha)

SEKSI 3

Kuta Cot Glie - Indrapuri
(157,829 Ha)

SEKSI 4

Indrapuri - Blang Bintang
(166,06 Ha)

SEKSI 5

Blang Bintang - Kuta Baro
(86,55 Ha)

SEKSI 6

Kuta Baro - Baitussalam
(45,40 Ha)



MENGOPTIMALKAN INOVASI LAYANAN PENGADUAN PERTANAHAN SECARA DIGITAL DI ACEH



Monitoring pengaduan secara berjenjang dari Kantor Wilayah ke Kantor Pertanahan



Kontrol kualitas dan monitoring langsung dari Eselon 2 dan Eselon 3 (Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pertanahan)



Lingkup pengaduan lebih komprehensif dan telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016



Respon cepat pengaduan



Disposisi langsung kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan kompetensi bidang

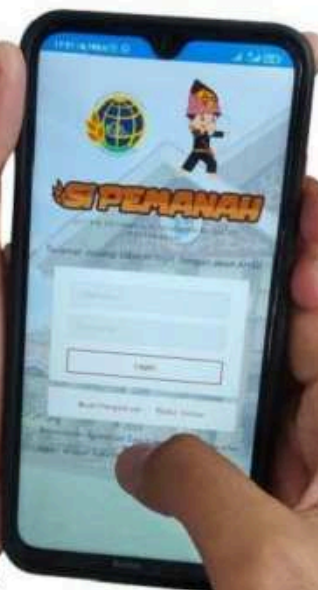
Hari ini harus lebih baik dari kemarin, hari esok wajib lebih baik dari hari ini.

Ungkapan tersebut rasanya tepat untuk menggambarkan kegemilangan rentetan capaian BPN Aceh setahun belakangan ini apabila ditinjau dari berbagai aspek, termasuk aspek pelayanan pengaduan. Di era ini, pengaduan yang dimaksud tentunya adalah pengaduan secara digital. Sejak awal tahun 2020, masing-masing Kantor Pertanahan memiliki inovasi layanan pengaduannya sendiri. Contohnya seperti "Kiban BPN Banda"-nya Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh dan "SIPUKAT"-nya Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur. Sayangnya, yang namanya "masing-masing" ya tetap "masing-masing". Artinya masing-masing aplikasi tersebut tidak menyediakan fitur yang membuat Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh selaku atasan masing-masing Kantor Pertanahan dapat melakukan supervisi serta kontrol terhadap penanganan pengaduan yang masuk via aplikasi-aplikasi tersebut.

Untuk menutupi kekurangan tersebut, di edisi sebelumnya kita sempat "menjanjikan" akan adanya inovasi layanan pengaduan secara digital di lingkungan Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh yang terintegrasi secara holistik dengan Kantor Pertanahan se-Aceh. Hari ini, Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh sudah berhasil mewujudkan hal tersebut.

Berawal dari inisiasi Kepala Seksi Penanganan Perkara Pertanahan, Fery Irwanda, S.H., M.H., yang mengusulkan pembentukan aplikasi pengaduan yang terhubung dengan seluruh Kantor Pertanahan se-Aceh yang kemudian mendapatkan atensi dan dukungan dari Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh, Dr. Agustyarsyah, S.Si.T., S.H., M.P., lahirlah aplikasi pengaduan digital yang diberi nama SIPEMANAH (Sistem Informasi Penanganan Masalah Pertanahan).

Ada 2 (dua) fitur yang tersedia di Aplikasi SIPEMANAH yaitu fitur pengaduan dan blokir online. Fitur pengaduan online sudah dapat digunakan saat ini. Form pengaduan yang disajikan oleh SIPEMANAH cukup simpel, sehingga dapat mudah dipahami oleh masyarakat. Respon cepat dari admin juga menjadi nilai lebih dari fitur ini. Selain untuk membuat pengaduan pertanahan, aplikasi ini juga melayani pertanyaan dalam ruang lingkup pertanahan. Namun perjuangan belum usai, saat ini fitur blokir online masih dalam tahap pembuatan. Kita berharap fitur ini dapat menjadi solusi bagi masyarakat agar Hak Atas Tanahnya tetap terjaga.





Rapat Kerja Daerah Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh Tahun 2020

Pojok Galeri



Rangkaian Kegiatan Rakerda Tahun 2020

Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) menjadi kegiatan penutup di tahun 2020 ini yang mempertemukan seluruh pimpinan Kantor Pertanahan di tingkat Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Aceh.

RAKERDA diselenggarakan secara bertahap, yakni Gelombang 1 (24 November-26 November 2020) dan Gelombang 2 (30 November-02 Desember 2020). Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya dari protokol pencegahan Covid-19 untuk tidak mengumpulkan massa dalam jumlah yang ramai.

Pelaksanaan RAKERDA pada penghujung tahun 2020 dirasa begitu berbeda dengan pelaksanaan RAKERDA yang terdahulu. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan RAKERDA kali ini didampingi dengan teknologi yang telah disempurnakan dari pelaksanaan RAKERDA sebelumnya, diantaranya adalah penggunaan absensi online dengan menggunakan teknologi scan barcode, serta memanfaatkan fitur tanya-jawab menggunakan aplikasi "Pigeonhole", mengingat minimalis tatap muka dan kontak fisik serta penerapan paper-less diberlakukan.

Dalam pelaksanaan RAKERDA yang diselenggarakan, juga turut hadir sejumlah millennial dari masing-masing satuan kerja untuk memaparkan progress maupun mendengarkan evaluasi serta para millennial juga turut dibekali dengan Upgrading Leadership dan pemberian award kepada sosok millennial inspiratif tahun 2020 yaitu sdr. Rendy Fahmi Roza. A.Md.

Rangkaian acara RAKERDA ditutup dengan penyerahan penghargaan kepada Kabupaten/Kota yang telah memberikan dukungan penuh Kepada Kantor Pertanahan dalam pelaksanaan kegiatan pertanahan yang dalam hal ini diberikan oleh Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Besar. Selain kepada daerah, penghargaan juga diberikan kepada 3 Kantor Pertanahan dengan ranking tertinggi yang penilaiannya didasarkan pada aplikasi evaluasi internal Kanwil BPN Aceh, yaitu RAPOR-KITA. Ketiga Kantor Pertanahan tersebut adalah, Kantor Pertanahan Kabupaten Bireun, Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya, dan Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat Daya.

AGRITOURISM DAN URBAN FARMING DALAM MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN NASIONAL

Urban Farming adalah kegiatan bercocok tanam atau beternak secara mandiri, di wilayah perkotaan dengan lahan terbatas dan hasilnya bisa untuk dikonsumsi sendiri maupun dijual sesuai kapasitas dan kebutuhan.

Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, mengakibatkan semakin banyaknya pembangunan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan terjadi alih fungsi lahan sawah/pertanian menjadi pembangunan tempat tinggal, sekolah, perkantoran maupun pabrik industri. Akibat hal tersebut, lahan pekarangan menjadi salah satu alternatif pemanfaatan lahan sempit untuk pertanian.

Pekarangan merupakan lahan yang berada di sekitar lingkungan kita, baik di rumah maupun di kantor. Apabila dimanfaatkan secara optimal maka dapat memberikan nilai tambah bagi individu yang ada didalamnya. Pemanfaatan pekarangan dapat dilakukan dengan berbagai cara sesuai dengan kondisi pekarangan yang ada. Khususnya di lahan yang sempit dapat dilakukan melalui vertikultur, tabulampot, hidroponik dan lainnya. Di lingkungan Kanwil ATR/BPN dan beberapa Kantor Pertanahan yang ada di Provinsi Aceh, lahan kantor mulai dimanfaatkan untuk budidaya maupun kegiatan pemberdayaan lahan lainnya.

Adapun manfaat dari urban farming, yaitu:

- Dapat memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri.
- Mengasah kreativitas dalam mengoptimalkan hasil panen di lahan terbatas dan meminimalkan biaya.
- Meningkatkan kesehatan tubuh dan mental.
- Menghemat pengeluaran untuk keperluan dapur dan konsumsi makanan.
- Bisa jadi ladang penghasilan serta membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain.

Pemberdayaan Lahan Sempit diTanah Eks. Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh

Sasaran

- Mempermudah bagi masyarakat Banda Aceh untuk berwisata serta memberikan edukasi tentang pemanfaatan lahan tidur bagi pertanian.
- Mempermudah untuk mendapatkan hasil pertanian yang berkualitas dan kebutuhan pangan bagi masyarakat perkotaan dan masyarakat umumnya.
- Menurunkan angka pengangguran bagi masyarakat sekitar.

Progres

- *Land clearing.*
- Pemasangan patok batas bidang.
- Pemasangan papan nama.

Hambatan dan Masalah

- Ketersediaan air.
- Tekstur tanah yang terlalu basah.
- Keamanan dalam pemeliharaan (tidak tersedianya pagar yang memadai)..

Rekomendasi

- Membangun sarana ketersediaan air.
- Pembuatan jalan setapak di areal parkir dan lahan pertanian.
- Perbaikan pagar.

Pembagian Lahan dan Jenis Pemberdayaan

BIDANG 1

Jeruk Kasturi
Serai, Jahe Merah
Cabe Rawit,
Timun
Mint, Sirsak
Kacang Panjang
Kelor & Gembas

BIDANG 2

Sawi, Kangkung
Bayam, Terong,
Cabe, Tomat,
Pohon Pisang

BIDANG 3

Selada,
Daun Soup
Pakchoy,
Kangkung
Sawi, Kelulut
Jeruk Bali
Budikdamber

BIDANG 4

Cabe, Terong
Pisang, Tomat

BIDANG 5

Jagung,
Kangkung

TU

Terong Ungu,
Daun Bawang Prei



JANGAN KENDOR 3M

TETAP PATUHI PROTOKOL KESEHATAN



**MENGGUNAKAN
MASKER**



**MENCUCI TANGAN
PAKAI SABUN**



**MENJAGA JARAK
MINIMAL 2 METER**

APLIKASI PENGADUAN DI SELURUH PROVINSI ACEH

sipemanah.atrbpnaceh.com

